

PROTEKSI TAK KOMPREHENSIF

Regulasi soal pembukaan keran impor plastik kembali disorot. Pengabaian usulan dunia usaha oleh pemerintah dinilai kontraproduktif dengan pengembangan manufaktur nasional, utamanya industri petrokimia.

Anitana W. Puspa & Rahmad Fauzan
redaksi@bisnis.com

BISNIS Fokus

Pangkal persoalannya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang diundangkan 17 Mei 2024.

Empat bulan pascaimplementasi regulasi tersebut, dunia usaha mulai merasakan dampak yang cukup besar, yakni terganggunya utilitas industri akibat membanjirnya impor plastik.

Data yang diperoleh *Bisnis* dari pintu masuk aktivitas perdagangan menunjukkan, terjadi lonjakan impor plastik sejak regulasi itu diterapkan, yakni dari 69.619 ton pada April 2024 menjadi 116.329 ton pada Mei 2024 dan terus mendaki hingga bulan ini.

Musababnya, Permendag No. 8/2024 banyak menanggalkan aturan pengendalian berupa Pertek (Pertimbangan Teknis). Bahkan untuk produk petrokimia, dari awalnya dikenakan Pertek dan ketentuan pembatasan sebanyak 12 HS (Harmonized System), tersisa 1 HS.

Parahnya lagi, sebagian besar produk jadi yang dicap sebagai barang konsumsi, serta diimpor Angka Pengenal Importir Umum (API-U), tak lagi melewati prosedur pengawasan.

Petrokimia selaku industri hulu yang menghasilkan produk kimia organik sebagai bahan baku industri plastik, kalang kabut. Jika tak ada penyesuaian, investasi puluhan triliun yang dikomitmenkan terancam menguap.

Pelaku usaha pun bukannya tak memprotes pemerintah. Berdasarkan informasi yang diperoleh *Bisnis*, pengusaha telah mengajukan sejumlah langkah untuk menguatkan perlindungan pada sektor ini.

Di antaranya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) untuk bahan baku plastik seperti *polypropylene* (PP) dan *linear low density polyethylene* (LLDPE). Namun, usulan itu tak digubris.

Kalangan pelaku usaha yang dihubungi *Bisnis* memandang, ada ketidakadilan perlakuan proteksi yang diterapkan pemerintah antara industri hulu dan industri hilir.

Pada industri hulu, ruang gerak tak leluasa lantaran turunnya utilitas produksi sebagai konsekuensi banyaknya impor bahan baku. Namun bagi industri hilir, kebijakan ini menguntungkan karena pembukaan keran impor yang diiringi dengan banyaknya perjanjian kemitraan dagang mengamankan bahan baku.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai, mengatakan akibat Permendag No. 8/2024, utilisasi industri petrokimia tertekan hingga ke level 50%—60%.

Padahal, selama ini batas bawah utilisasi sektor ini ada petrokimia mulai merugi.

"Berdarah-darah jadinya. Laporan-laporan industri plastik sama petrokimia semuanya minus. Kami sedang mencoba semaksimal mungkin agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja," katanya kepada *Bisnis*.

Sementara memutar otak, pelaku usaha petrokimia di dalam negeri menunggu respons pemerintah atas rekomendasi pemberlakuan sistem *safeguard* dari gempuran barang impor yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada April 2024.

Dalam hal ini, pelaku industri mengajukan perlindungan terhadap produk *linear low density polyethylene* (LLDPE),

bahan plastik paling lentur dibandingkan dengan turunan polietilena lainnya.

Edi berharap, pemerintah mengkaji penerapan *domestic market obligation* (DMO) dalam rangka menjaga utilisasi. Dengan demikian, komposisi pemenuhan kebutuhan di dalam negeri bisa ideal, yakni 80% pasokan dari dalam negeri, sementara 20% sisanya disuplai via importasi.

Inaplas juga berharap tata naga impor kembali mengadopsi ketentuan di dalam Permendag No. 36/2023, yang menampung penambahan prosedur verifikasi, hingga ketentuan pertimbangan teknis.

Sementara itu, sumber *Bisnis* yang dekat dengan otoritas perdagangan mengatakan, pelaku usaha di sektor petrokimia telah mengajukan beberapa penyesuaian kepada pemerintah.

Salah satunya penguatan proteksi di sektor hulu sebagai bagian dari fasilitas untuk merespons besarnya investasi yang telah dikurirkan oleh petrokimia.

Sayangnya, pemerintah mengabaikan permintaan tersebut sehingga petrokimia amat dirugikan. "Dampak besar ada di petrokimia," katanya.

INDUSTRI HILIR

Di tengah berdarah-darahnya sektor hulu, industri hilir justru mendapatkan berkah dari Permendag No. 8/2024. Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) merespons positif regulasi yang merelaksasi impor itu.

Sekjen Aphindo Henry Chevalier, mengatakan dalam regulasi tersebut substansi yang diatur adalah importasi barang-barang plastik produk jadi. "Untuk industri hilir itu sangat membantu sekali," katanya.

Meski cukup diuntungkan, Henry menekankan bahwa lambat laun pembukaan keran impor ini turut mengganggu eksistensi bisnis di sektor hulu.

Idealnya, pemerintah menyusun kebijakan proteksi kepada industri secara komprehensif sehingga tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Terlebih, saat ini ada banyak komitmen investasi dari petrokimia yang dalam jangka panjang akan meningkatkan pasokan bahan baku kepada industri hilir.

Henry tak memungkiri bahwa petrokimia menjadi sektor yang paling dirugikan. Akan tetapi menurutnya, saat ini kebutuhan bahan baku belum mampu dipasok sepenuhnya dari dalam negeri.

"Kami melakukan kajian, hasilnya industri petrokimia tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri, paling tinggi 60%—70%,"

Sejumlah perusahaan plastik pun tak menampik bahwa Permendag No. 8/2024 relatif menguntungkan. PT Trias Sentosa Tbk. (TRST) misalnya, yang merasakan efek positif dari regulasi tersebut.

Komisaris PT Trias Sentosa Tbk. Sugeng Kurniawan, mengatakan kemudahan impor meningkatkan efisiensi bisnis perseroan dan menjadi kunci utama untuk mencatatkan kinerja lebih positif.

"Pasokan bahan baku plastik saat ini tidak ada masalah. Umumnya China yang saat ini paling kompetitif," katanya.

Selaras, Direktur PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) Lukman Hakim, mengatakan

pemenuhan kebutuhan bahan baku bergantung pada harga yang kompetitif. "Kami memproduksi kemasan plastik yang mendukung aktivitas di pasar tradisional dan UMKM. Tentu kami butuh harga yang kompetitif," ujarnya.

EVALUASI

Dalam konteks perlakuan proteksi, Dirjen Perdagangan Luar

Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, mengatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi untuk merespons keluhan pengusaha terutama di sektor hulu.

Dia menekankan, perlindungan industri mengacu pada aspek berimbang untuk semua sektor, baik industri hulu maupun industri hilir. "Keberpihakan hanya kepada salah satu sektor industri akan mengakibatkan ketimpangan untuk industri lainnya," katanya.

Sementara itu dalam konteks manufaktur, sejumlah pejabat di Kementerian Perindustrian tidak merespons pertanyaan yang disampaikan *Bisnis*.

Termasuk mengenai solusi pengamanan dan proteksi petrokimia tanpa mengabaikan kepentingan industri hilir.

Menanggapi dinamika ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, menilai perlu ada keseimbangan kebijakan untuk menjawab tantangan industri plastik, termasuk petrokimia. Faisal mengatakan, di

satu sisi sektor hilir membutuhkan pasokan yang murah, baik bahan baku dari petrokimia maupun ongkos logistik. Solusinya sejauh ini memang hanya tersedia melalui impor.

Terlebih, kebijakan impor dipermudah dengan adanya perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement*/FTA) dengan Uni Emirat Arab (UEA), yang makin membuka keran impor yang lebih besar.

Di lain sisi, sektor hulu yakni industri petrokimia mengalami penurunan kapasitas produksi karena pasar di dalam negeri tergerus. Jika tak direspons, kinerja sektor petrokimia makin menurun.

Padahal, menurut Faisal, jika ada keseimbangan kebijakan antara hulu dan hilir, maka kedua sektor ini dapat memperoleh solusi terbaik. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada petrokimia di tengah terus berkurangnya kapasitas produksi.

"Perlu ada keseimbangan dari sisi kebijakan karena kita ingin industri petrokimia juga berkembang sebagai salah satu industri utama, salah satu *mother of industry* bagi berbagai macam industri yang lain," jelasnya. (Aziz Rahardyan/Maria Elena) 13

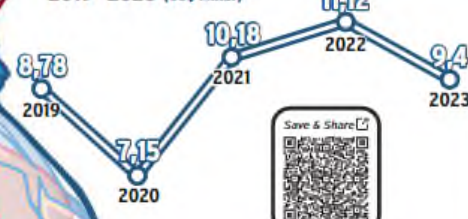
Data Impor Plastik 2024

Bulan	Nilai Devisa (Juta US\$)	Volume (Ton)
Januari	140,13	126.085
Februari	216,13	196.873
Maret	104,56	90.442
April	82,36	69.619
Mei	136,46	116.329
Juni	134,04	114.034
Juli	160,81	134.923
Agustus	160,93	138.232
September*	118,48	104.499

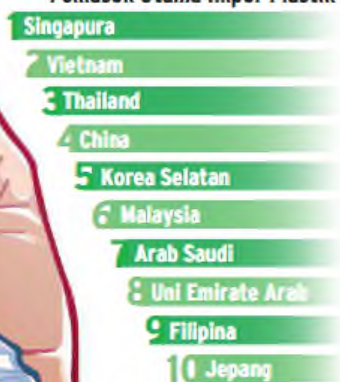
* Per 24 September

BISNIS/KEVIN CHRISTIAN

Nilai Impor Plastik dan Barang dari Plastik 2019–2023 (US\$ Miliar)



Pemasok Utama Impor Plastik



Sumber: Satu Data Kemendag, Kementerian Keuangan, Inaplas

Temuan Inaplas Soal Dampak Permendag No. 8/2024

Impor Marak Asal:

- Thailand
- Vietnam
- Malaysia
- China
- Korea Selatan
- Timur Tengah

“

Kami sedang mencoba semaksimal mungkin agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.